

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.<sup>1</sup>

Kemampuan Keuangan daerah di tentukan oleh ketersediaan sumber-sumber pajak dan tingkat hasil dari obyek tersebut. Tingkat hasil tersebut di tentukan oleh sejauhmana sumber pajak (*tax bases*) responsif terhadap kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi obyek pengeluaran seperti; inflasi, pertambahan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan berkorelasi dengan tingkat pelayanan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Daerah akan menentukan juga tingkat kemampuan keuangannya. Setiap Daerah mempunyai potensi pendapatan yang berbeda karena perbedaan kondisi ekonomi, sumber daya alam, besaran wilayah, tingkat pengangguran, dan besaran penduduk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, [http://www.ekonomirakyat.org/edisi\\_4/artikel\\_3.htm](http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm)

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publik service*) dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu: meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (*publik*) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.<sup>3</sup>

Dengan pembangunan diharapkan kemampuan daerah selaras dengan pembangunan nasional sehingga dapat mewujudkan daerah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan GBHN tentang tujuan pembangunan nasional. Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>4</sup>

Daerah tingkat II merupakan daerah otonom yang mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana dari pembangunan, maka titik berat otonomi diletakkan pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah tingkat II yang lebih berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, "Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah", Andi, Yogyakarta, 2002, Hlm. 59.

<sup>4</sup> Didit W. Udjianto, "Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembiayaan Pengeluaran Rutin Daerah Kabupaten Kulon Progo", dalam *Jurnal IESP*, Vol 4, No. 1, April 2003.

<sup>5</sup> Mardiasmo, "Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah", Andi, Yogyakarta, 1995, Hlm. 117.

Untuk memperkuat otonomi daerah dalam upaya mencapai kemajuan dan kemandirian serta pelaksanaan pembangunan diberbagai bidang diperlukan sumber kekayaan daerah yang memadai. Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD, Penerimaan Dinas-dinas, serta Penerimaan Lain-lain yang meningkat terus dari tahun ke tahun akan mempengaruhi APBD. Sektor Pajak Daerah memegang kendali dalam ikut memacu tingkat kenaikan PAD, sedangkan Retribusi merupakan iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan secara ekonomis dengan suatu jasa balik langsung yang dapat ditunjuk. Bagian Laba BUMD dan Penerimaan Dinas pemasukannya tidak sebesar Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tapi Penerimaan Dinas ini bagi PAD merupakan sektor yang sangat penting juga begitu pula dengan Penerimaan Lainnya.<sup>6</sup>

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah melihat posisi keuangannya. Posisi keuangan daerah dapat dilihat dari APBD, yang merupakan perencanaan keuangan daerah dan menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran daerah untuk membiayai semua kegiatan pembangunan dalam setiap tahun anggaran.

PAD merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dalam mendukung kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. PAD ini merupakan pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan

untuk masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk meningkatkan dan memperkuat otonomi daerah di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan agar mencapai kemajuan dan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan sumber kekayaan daerah yang memadai. Penerimaan pajak daerah, Retribusi daerah, BUMD, Penerimaan dari Dinas – dinas, dan Penerimaan lain – lain yang meningkat terus dari tahun ke tahun akan mempengaruhi APBD. Sektor pajak daerah memegang kendali dalam memacu tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulisan ini mengambil judul : “  
PERANAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PERBANDINGAN ANTARA KOTA PEKALONGAN DAN KABUPATEN PEKALONGAN “

### **B. Batasan Masalah Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data time series tahunan dari tahun 1985.– 2004 dimana variabel dependennya terbatas pada Pendapatan Asli Daerah dan variabel independennya terbatas pada Pajak Daerah.

### **C. Rumusan Masalah Penelitian**

“ Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sehingga suatu daerah lebih cepat

.....

Pekalongan akan terus meningkat di masa yang akan datang, maka perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
2. Bagaimana perbandingan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengetahui perbandingan besarnya tingkat efektivitas penerimaan PAD di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui perkembangan penerimaan PAD dari tahun ke tahun di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah daerah dapat memberikan masukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi penulis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan berlatih memahami dalam menggunakan alat analisis.
3. Berguna sebagai bahan informasi bagi pihak – pihak yang mempunyai